

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum PT. Pos Indonesia (Persero)

4.1.1.1 Pendirian dan Sejarah PT Pos Indonesia.

PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan peralihan bentuk dari perum Pos dan Giro. Peralihan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1995, tanggal 27 Februari 1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995).

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero), ditetapkan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8182 HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Juni 1995. Anggaran dasar tersebut kemudian diubah dengan

:

1. Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero)
2. Akta Notaris Sutjipto, SH . Nomor : 111 tanggal 28 Oktober 1998 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan (Persero) PT Pos Indonesia (Persero).
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Nomor : C 2-

27.854-HT 01.04 tahun 1998, tanggal 11 Desember yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tanggal 11 Desember 1998 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78, pada tanggal 28 September 1999.

Berikut ini adalah sejarah PT. Pos Indonesia (Persero) mulai dari berdiri hingga sekarang.

Tabel 4.1
Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero)

Tahun	Uraian
26-8-1746	Kantor pos pertama di Indonesia adalah di Batavia didirikan oleh Gubernur Jendral GW Baron
1906	Posts Telegraafend Telefoon Diensts
27-9-1945	Jawatan PTT Republik Indonesia ditandai Pengambilalihan Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan Militer Jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bakti Postel
1961	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.240 Tahun 1961 status Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi
1965	PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi : PN Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965
1978	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro.
20-6-1995	Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (Persero)

(Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11);

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1998 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998

4.1.1.2 Struktur Organisasi dan Susunan Direksi serta Komisaris

1. Struktur Organisasi

Setiap badan usaha baik Negara maupun Swasta, dalam mengelola usahanya perlu ada manajemen yang terstruktur. Hal ini diwujudkan dengan struktur organisasi. Organisasi merupakan bentuk perkumpulan sekelompok manusia yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi tersebut diharapkan adanya jalinan kerjasama dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga dapat tercapai sasaran yang telah direncanakan. Menurut surat keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero)

Di bawah ini adalah struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor 28 A/DIRUT/1999 tentang organisasi dan tata kerja PT Poa Indonesia (Persero) disusun dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

A. Tingkat Pusat

Struktur organisasi pada tingkat pusat terdiri dari:

1. komisaris

Komisaris memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut ini:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi serta memberi nasihat kepada direksi, termasuk mengenai rancangna perseroan, rencana kerja, dan anggaran tahunan persero, pelaksanaan anggaran tahunan persero, pelaksanaan Anggaran Dasar dan RUPS.
- b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan RUPS
- c. Melaksanakan kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan direksi serta menanda tangani laporan tersebut.

2. Direksi

Direksi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut ini:

- a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan serta fasilitas pemeliharaan atau perbaikan
- d. Mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan
- e. Menyiapkan rancangan jangka panjang dan rencana Kerja Anggaran Tahunana Perusahaan.

- f. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, dengan memperhatikan pemisahan pengurus, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan kekayaan perusahaan.
- g. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan rincian tugasnya.
- h. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan sesuai dengan peraturan pegawai yang berlaku bagi perusahaan.
- i. Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.
- j. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku bagi perusahaan.
- k. Menjalankan kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan RUPS

Pada struktur organisasi PT Pos Indonesia terdapat pembagian tugas fungsi direksi sebagai berikut:

1. Direktur Utama
 - a. Untuk dan atas nama direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas segala ketentuan RUPS
 - b. Bertindak atas nama direksi sebagai wakil perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan dan melakukan segala tindakan perbuatan

baik yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerjasama dengan pihak lain

- c. Mengkordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas direktur, Kepala Saattuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Wilayah Usaha Pos serta mengusulkan dan memimpin rapat direksi.
- d. Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- e. Mengadakan hubungan dengan pihak luarterutama mengenai hal-hal yang menyangkut kebijaksanaan pengembangan perusahaan dan kebijaksanaan lainnya yang bersifat umum.

2. Direktorat Operasi

Direktorat ini dipimpin oleh Direktur operasi yang bertugas membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan jasa telekomunikasi, logistik, serta jasa keuangan/keagenan dan filateli, baik untuk hubungan didalam maupun diluarnegeri. Direktorat operasi terdiri dari 8 (delapan) bagian:

a. Sub Direktorat Bina Operasi

- 1) Bagian jaringan Lalu Lintas Pos
- 2) Bagian jaringan Layanan

b. Sub Direktorat Bina Mutu Layanan

- 1) Bagian Standar Layanan
- 2) Bagian Kendali Mutu

3) Bagian Pengembangan Mutu

c. Unit Usaha Komunikasi

1) Bagian Target dan Kinerja Bisnis Komunikasi (Tarkinkom)

a) Sub Bagian Penempatan Target dan Kinerja Bisnis Komunikasi

b) Sub Bagian Administrasi dan pelaporan Bisnis Komunikasi

2) Bagian Pemasaran Bisnis Komunikasi

d. Unit Bisnis Logistik

1) Bagian Target Kinerja Logistik

2) Bagian Pemasaran Logistik

e. Unit Bisnis Keuangan dan Keagenan

1) Bagian Target dan Kinerja Bisnis Keuangan dan Keagenan

2) Bagian Pemasaran Bisnis Keuangan dan Keagenan

3) Bagian Pengelolaan Utang Piutang Usaha Keuangan dan Keagenan

f. Unit Bisnis Filateli

3. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

Direktorat ini dipimpin oleh Direktur Perencanaan, Teknik, dan Sarana yang mempunyai tugas menyusun rencana strategis, rencana bisnis dan rencana jangka pendek yang relevan sebagai tahapan pencapaian tujuan perusahaan dan melakukan aktivitas rekayasa proses bisnis serta mengelola prasarana dan properti. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana terdiri dari:

a. Sub Direktorat Perencanaan

- 1) Bagian Perencanaan Strategi
- 2) Bagian Perencanaan Usaha
- 3) Bagian Pengolahan Data

b. Sub Direktorat Teknik dan Sarana

- 1) Bagian Teknik dan Sistem Informasi
- 2) Bagian Prangko, Benda Pos dan Materai
- 3) Bagian Peralatan
- 4) Bagian Bangunan dan Kendaraan

c. Bagian Sekretaris Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

4. Direktorat Keuangan

Dipimpin oleh Direktur Keuangan, bertugas membina dan mengelola keuangan perusahaan dan penyertaan modal perusahaan serta menetapkan kebijakan barang pokok produksi. Direktorat Keuangan terdiri dari:

a. Sub Direktorat Pengendalian Keuangan

- 1) Bagian Akuntansi
- 2) Bagian Anggaran dan Investasi
- 3) Bagian Akuntansi Biaya

b. Sub Direktorat Perbendaharaan

- 1) Bagian Pengelolaan Kas
- 2) Bagian Pengendalian dan Penyertaan Modal Usaha

c. Bagian Sekretaris Direktorat Keuangan

5. Direktorat Sumber Daya Manusia

Dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia, yang mempunyai tugas membina, mengelola dan memelihara kesejahteraan sumber daya manusia serta mengembangkan organisasi dan sistem manajemen. Direktorat Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Sub Direktorat Pelatihan

- 1) Bagian Bina Program
- 2) Bagian Umum Pelatihan
- 3) Bagian Penyelenggaraan Pelatihan

b. Sub Direktorat Pengembangan SDM

- 1) Bagian Perencanaan SDM
- 2) Bagian Pembinaan SDM
- 3) Bagian Informasi dan Sistem Informasi Manajemen SDM
- 4) Bagian Organisasi

c. Bagian Pemeliharaan SDM

d. Bagian Sekretaris Direktorat SDM

6. Satuan Pengawasan Intern

Berada dibawah pimpinan Kepala Satuan Pengawasan Intern terdiri dari:

a. Bidang Pengawasan Keuangan

b. Bagian pengawasan Operasional

- 1) Bagian Pengawasan Keuangan
- 2) Bagian Pengawasan Operasional

7. Sekretariat Perusahaan

Dipimpin oleh sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab kepada direksi. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasi seluruh kegiatan anggota direksi dengan seluruh unit kesekretariatan direktur utama, kegiatan bidang hukum, hubungan masyarakat, hubungan internasional, dokumentasi serta rumah tangga kantor pusat dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan melekat. Sekretariat Perusahaan terdiri dari:

- a. Bagian Sekretaris Direktur Utama
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian komunikasi korporat
- d. Bagian Hubungan Internasional
- e. Bagian Dokumen dan Museum

8. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Dipimpin oleh kepala pusat Penelitian dan Pengembangan yang bertanggung jawab kepada direksi. Tugas pokoknya adalah melakukan penelitian dan pengembangan sistem manajemen, fungsi maupun produk layanan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Terdiri dari:

- a. Bagian Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang)
- b. Bagian Organisasi dan SDM
- c. Bagian Operasi dan Pemasaran
- e. Bagian Teknologi dan Sistem Informasi.

B. Tingkat Wilayah

Tingkat Wilayah PT Pos dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Pos(Kawilpos) yang bertanggung jawab kepada Direksi PT Pos Indonesia (Persero). Pada tingkat wilayah usaha pos ini terbagi menjadi:

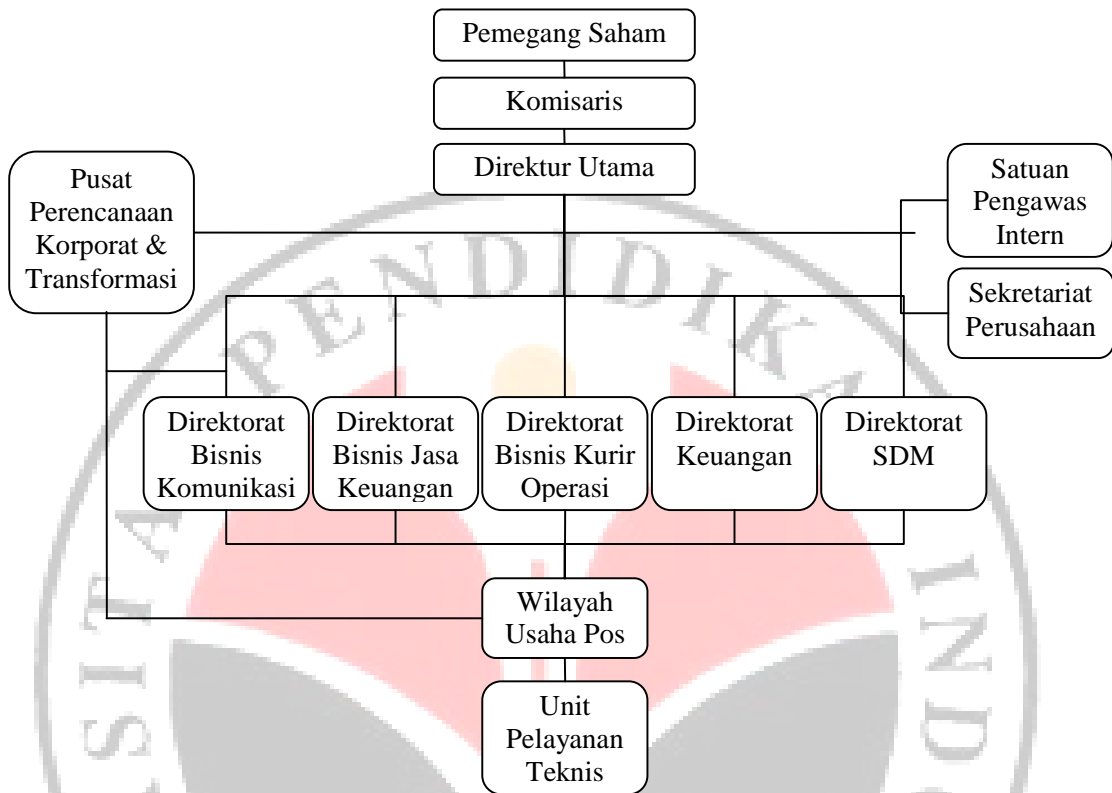
- a. Sekretaris Wilayah
- b. Bagian Bina Mutu Layanan
- c. Bagian Pengembangan Usaha
- d. Bagian Teknis dan Sarana
- e. Bagian Keuangan
- f. Bagian SDM

Wilayah Usaha Pos dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Wilayah Pos Tipe A, memiliki jumlah wilayah Sub Sebanyak-banyaknya 16
- b. Wilayah Pos Tipe B, memiliki jumlah Wilayah sub sebanyak-banyaknya 15
- c. Wilayah Pos Tipe C, memiliki jumlah Wilayah sub sebanyak-banyaknya 14

C. Tingkat Unit Pelsaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada kawilpos. Dimana organisasi dan tata kerja kategori dan tempat kedudukan UPT ditetapkan oleh direksi.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero)

2. Susunan Direksi dan Komisaris

Susunan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor kep.55/MBU/2005, tanggal 25 Agustus 2005, tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia. Susunan Direksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hana Suryana : Direktur Utama
2. Hani Johanis : Direktur Keuangan
3. Soebandi : Direktur Bisnis Kurir/Operasi
4. San Herib : Direktur Bisnis Komunikasi
5. Arief Supriyono : Direktur Bisnis Jasa Keuangan
6. Endad Rachmad Akus : Direktur Sumberdaya Manusia(SDM)

Susunan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : Kep-56/MBU/2005 tanggal 26 Agustus 2005, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan PT Pos Indonesia. Adapun susunan komisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alinafiah : Komisaris Utama
2. Ashwin Sasongko : Komisaris
3. Herry Purnomo : Komisaris
4. Megananda : Komisaris
5. Andi Arif : Komisaris.

4.1.1.3 Visi, Misi, Keyakinan Dasar, dan Nilai-Nilai Dasar

Visi dan misi suatu perusahaan merupakan hal yang penting, dalam menjalankan aktivitas perusahaan, karena visi dan misi merupakan suatu acuan yang dipedomani untuk menjalankan perusahaan tersebut. Visi, misi PT Pos Indonesia (Persero) No. 01/Dirut/1997, tanggal 2 Januari 1997, dan telah beberapa kali

disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No KD 17/Dirut /0604, tanggal 7 Juni 2004, tentang Penyempurnaan Visi, Misi dan penetapan Keyakinan Dasar serta Nilai-Nilai Dasar PT Pos Indonesia (Persero). Di dalam Keputusan Direksi tersebut antara lain ditetapkan sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi perusahaan Pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama stakeholder domestik maupun global dalam mewujudkan pengembangan bisnis dengan pola kemitraan, yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai.

2. Misi

Memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan, dan filateli berbasis jejaring terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global.

3 Keyakinan Dasar

Keyakinan Dasar PT Pos Indonesia (Persero) adalah karyawan yang bertalenta (*talented people*), keunggulan layanan (*Excellence Service*), nilai-nilai bagi pelanggan (*customer valuse*), dan pertumbuhan kinerja keuangan yang tinggi dan berkelanjutan.

4. Nilai-nilai dasar PT Pos Indonesia (Persero)

Nilai-nilai dasar PT Pos Indonesia (Persero) adalah regangkan tujuan (*Stretchng Goals*), integritas (*integrity*), berpikir kesisteman (*system Thingking*),

berani dan bertanggung jawab (*courage and Responsible*), dan penghargaan berbasis kinerja (*Reward Based on Performance*)

4.1.1.4 Strategi Pokok Perusahaan

Strategi perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) telah disusun dengan mengacu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta diarahkan untuk memberikan hasil terbaik kepada tanahair Indonesia. Strategi pokok perusahaan dikenal dengan nama catur sukses sapta pedoman (CSSP). Terdiri dari:

- a. Dua unsur modal dasar, yaitu kerjasama dan konsistensi
- b. Dua unsur strategi perusahaan, untuk membina sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan.
- c. Tiga unsur sarana pokok yaitu kepuasan pelanggan, komitmen terhadap pelayanan umum dan hasil terbaik

4.1.1.5 Produk PT. Pos Indonesia (Persero)

1. Paket Pos

Terdiri dari:

a. Paket pos Biasa

Kemasan yang berisi barang dengan ketentuan sebagai berikut:

darat/laut dengan berat maksimum 40 kg.

udara dengan berat maksimum 30 kg.

b. Paket pos Kilat Khusus-PPKH

2. Filateli

Segenap aneka kehidupan manusia dapat tercantum pada prangko yang diterbitkan oleh semua negara di dunia, sehingga seorang pengumpul prangko dapat menambah pengetahuan yang luas dari seri-seri tema yang diterbitkan setiap tahunnya. Dari aspek-aspek tema yang demikian melimpah pengumpul prangko terbagi menjadi pengumpul prangko umum (advanced collector) dan pengumpul tematik yaitu pengumpul prangko yang membatasi diri pada pengkhususan objek tertentu. Untuk kegemaran mengumpulkan prangko ini waktu, tenaga dan uang tidaklah ada artinya apabila dibandingkan dengan kesenangan, kebahagiaan serta kepuasan yang dapat dipetik pada saat melihat hasil koleksi prangko yang telah ditata. Tanpa disadari, seorang pengumpul Prangko yang menekuni hobinya dengan sungguh-sungguh, akan memperoleh pengetahuan yang luas. Prangko-prangko yang diterbitkan oleh berbagai negara dapat menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan sejarah, ekonomi, politik, kebudayaan, flora, fauna dan lain-lain.

3. Keuangan

a. Weselpos Instan (Remittance)

Merupakan solusi untuk pengiriman uang secara cepat dan aman karena penerima dilengkapi dengan PIN, dapat diambil diseluruh Kantor Pos dalam jaringan. Weselpos Instan (Remittance) memiliki moto yaitu: "Hanya dalam hitungan detik". Adapun visinya adalah "sarana tercepat pengiriman uang". Sedangkan misinya adalah

”Memenuhi kebutuhan pengiriman uang tunai dengan segera tanpa penerima harus memiliki account”. Latar belakang dari Weselpos Instan (Remittance) adalah Tuntutan masyarakat untuk pengiriman uang secara cepat dan aman baik untuk keperluan bisnis maupun non bisnis.

PT. Pos Indonesia (Persero) dengan produk Weselpos Instan (Remittance) Memiliki komitmen harga yang terjangkau, kiriman uang cepat dan aman sampai ditujuan.

Jangkauan layanan produk Weselpos Instan (Remittance) adalah Terbatas untuk Kantor Pos dalam jaringan (200 Kantor Pos) diseluruh Indonesia, dengan tarif Rp 22.000,-/transaksi dengan maksimal uang Rp 25 Juta (termasuk Ppn 10 %)

b. Weselpos Prima

Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level H+0/ H+1. Produk Kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah. Weselpos Prima memiliki moto yaitu “Jangkauan luas, tanpa account kami yang tercepat”. Adapun misinya adalah ”Membantu kebutuhan untuk pengiriman uang secara cepat keseluruh Indonesia” Sedangkan latar belakangnya adalah “Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman uang secara cepat keseluruh Indonesia tanpa account.

PT. Pos Indonesia (Persero) dengan produk Weselpos prima memiliki Komitmen harga yang terjangkau, kiriman uang aman sampai di tujuan dengan cepat.

Jangkauan Layanan adalah seluruh Indonesia.

Adapun tarif yang digunakan adalah sebagai berikut ini:

- a). 1 s/d 100.000 : 6.600
- b). >100.000 s/d 150.000 : 7.700
- c). >150.000 s/d 200.000 : 8.800
- d). >200.000 s/d 5.000.000 : 9.900
- e). >5.000.000, kenaikan setiap 5.000 .000 atau bagian dari 5.000.000 berikutnya :
2200 (termasuk Ppn 10 %)

c. Weselpos Luar Negeri (Western Union)

Sarana pengiriman dan penerimaan uang untuk tujuan diseluruh dunia dengan level service H+0. Kiriman dapat diterima diseluruh Kantor Pos dalam jaringan. Adapun moto dari Weselpos Luar Negeri (Western Union) adalah “ cara tercepat untuk mengirim dan menerima uang di seluruh dunia”. Visinya adalah “Menjadi “Icon” PT Pos Indonesia di Luar Negri “. Sedangkan yang menjadi misinya adalah “Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengiriman uang diseluruh dunia”. Adapun yang menjadi latar belakang dari Weselpos Luar Negeri (Western Union) adalah bahwa masyarakat memerlukan jasa layanan pengiriman uang keseluruhan dunia secara cepat dan aman.

PT Pos Indonesia dengan produk Weselpos Luar Negeri (Western Union) memiliki komitmen sebagai berikut ini:

1. Biaya terjangkau, kiriman uang dapat diterima secara cepat dan aman.
2. Jangkauan Layanan Kantor Pos dalam jaringan

3. Tarif Progresif berdasarkan besar uang kiriman

d. SOPP (System Online Payment Point)

Kantor pos dalam jaringan SOPP (System Online Payment Point) merupakan cara tercepat, mudah dan praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa seluler. Memiliki moto "One stop payment", dengan visi "Mempermudah transaksi pembayaran rekening, tagihan serta tabungan". Sedangkan yang menjadi misinya adalah "membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan setoran/pembayaran rekening, tagihan serta tabungan". Adapun yang menjadi latar belakang dari produk SOPP (System Online Payment Point) adalah bahwa kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran rekening, tagihan serta tabungan semakin banyak sementara Kantor pos mempunyai jaringan yang sangat luas dan tersebar.

Komitmen dari produk SOPP (System Online Payment Point) adalah "penerimaan setoran secara online/real time". Jangkauannya adalah Kantor Pos di seluruh Indonesia yang tergabung dalam jaringan SOPP, dengan tidak dikenakan tarif kepada pelanggan.

e. Weselpos Standard

Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) uang dapat diantar sampai rumah. Moto dari Weselpos

Standard adalah ” uang anda aman sampai ke penerima”. Visinya ” Memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengirim uang dengan aman”. Misinya adalah ” Memberi kemudahan dalam melakukan pengiriman uang”, dan yang melatarbelakangi Weselpos Standard adalah seluruh lapisan masyarakat memerlukan jasa pengiriman uang.

Adapun yang menjadi komitmen dari Weselpos Standard adalah harga yang terjangkau dan kiriman uang aman sampai di tujuan, dengan jangkauan layanan seluruh Indonesia.

Tarif yang dikenakan oleh Weselpos Standard adalah sebagai berikut:

- a) 1 S/d 100.000 : 4.400
- b) >100.000 s/d 150.000 : 5.500
- c) >150.000 s/d 200.000 : 6.600
- d) >200.000 s/d 5.000.000 : 7.700
- e) >5.000.000, kenaikan setiap 5.000.000 atau bagian dari 5.000.000 berikutnya:
2.200 (termasuk Ppn 10 %)

f. Weselpos Berlangganan

Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dalam jumlah uang yang tetap dan rutin, dan kiriman uangnya dapat diterima di rumah. Adapun moto dari Weselpos Berlangganan adalah “Kami tidak pernah terlambat”. Visinya ” Membantu memenuhi kebutuhan uang tunai secara rutin dalam jumlah yang tetap”. Sedangkan yang menjadi misinya adalah ”Kebutuhan uang tunai terpenuhi tanpa ada kata terlambat” . Adapun yang melatarbelakangi Weselpos Berlangganan adalah

memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan kiriman uang tunai secara rutin dan dalam jumlah yang tetap.

Weselpos Berlangganan memiliki komitmen biaya yang terjangkau, kiriman uang dapat diterima tepat waktu secara rutin, dengan jangkauan seluruh Indonesia.

Tarif yang dikenakan oleh Weselpos Berlangganan adalah sebagai berikut ini:

- a). 1 s/d 100.000 : 6.600
- b). >100.000 s/d 150.000 : 7.700
- c). >150.000 s/d 200.000 : 8.800
- d). >200.000 s/d 5.000.000 : 9.900
- e). >5.000.000 , kenaikan setiap 5.000 .000 atau bagian dari 5.000.000 berikutnya:
2200

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Sebuah data tidak akan berfungsi dengan optimal jika hanya dijadikan dokumen semata, dan relatif tidak bermanfaat dalam pengambilan keputusan apabila tidak diolah lebih lanjut dan tetap dalam kondisi data mentah. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dikelompokkan agar lebih mudah untuk diolah dan dianalisis sehingga data tersebut akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang mengumpulkannya.

Data penelitian ini adalah data modal kerja dari tahun 1997 sampai dengan 2006, beserta data rasio likuiditasnya yaitu “*Current Ratio*” dari PT. Pos Indonesia

(Persero). Analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan demi kemajuan dan perkembangan analisis manajemen keuangan.

Untuk mendapat data tentang modal kerja dan likuiditas pada PT. Pos Indonesia (Persero). Dibutuhkan data mentahnya yaitu yang menjadi indikator dari modal kerja dan likuiditas yaitu aktiva lancar dengan hutang lancar.

4.1.2.1. Modal kerja

Telah dijelaskan pada bab II, penelitian ini menggunakan konsep modal kerja kualitatif atau konsep Modal Kerja Bersih (Net Working Capital).

Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan Modal Kerja Bersih (Net Working Capital), yaitu perkembangan aktiva lancar dan perkembangan hutang lancar secara bersama-sama, pada periode 1997-2006.

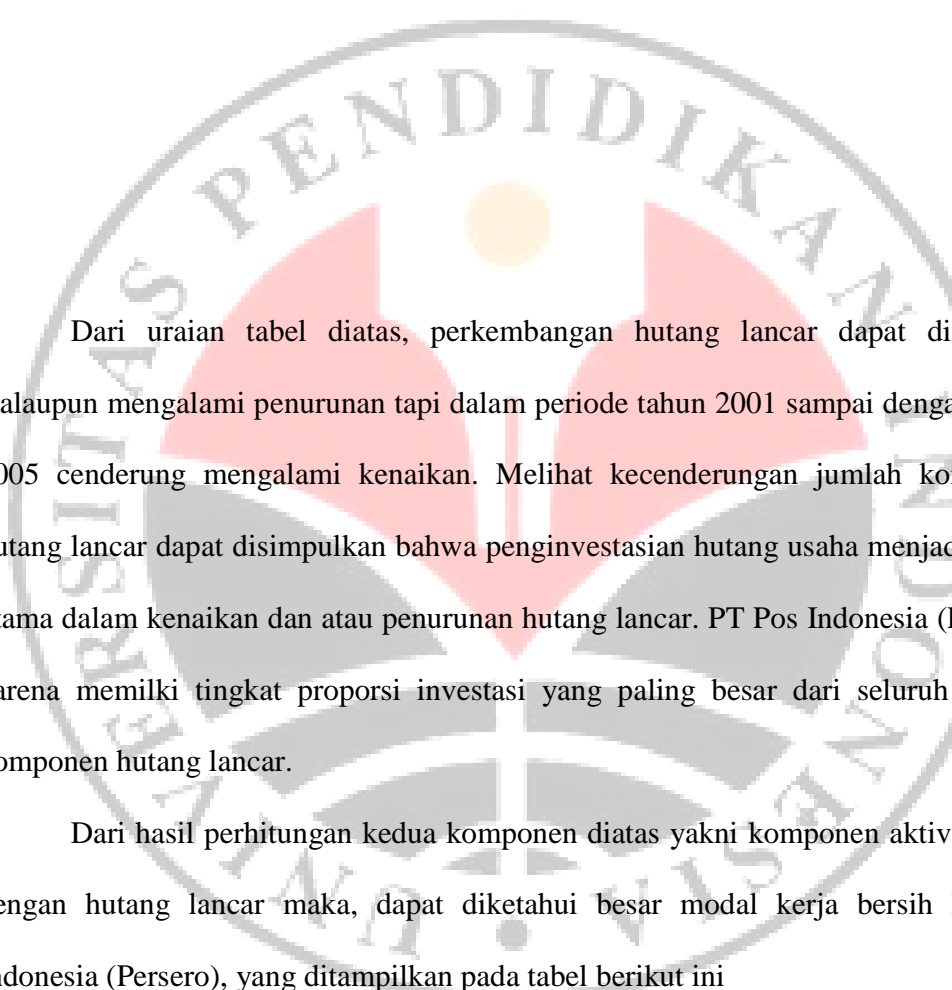


Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, perkembangan aktiva lancar dapat diketahui mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan dan kenaikan dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

Penurunan aktiva lancar terjadi pada tahun 1996 sebesar Rp. 40,616,077,367.00 dari tahun 1995, penurunan yang kedua terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp. 133,951,423,894.00 dari tahun 1999. Penurunan yang ketiga terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp. 7,977,124,960.00 dari tahun 2001. Penurunan yang keempat terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 139,223,184,311.00 dari tahun 2003.

Kenaikan aktiva lancar terjadi pada tahun 1997 yaitu sebesar Rp. 139,618,408,465.00 dari tahun 1996, kenaikan yang kedua terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar Rp. 116,678,498,156.00 dari tahun 1997, kenaikan yang ketiga terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar Rp. 157,039,833,763.00 dari tahun 1998. Kenaikan yang keempat terjadi pada tahun 2001 sebesar Rp. 91,413,436,489 dari tahun 2000, pada tahun 2003 kenaikan sebesar Rp. 330,380,716,814 dari tahun 2002 dan tahun 2005 sebesar Rp. 162,463,976,683 dari tahun 2004





Dari uraian tabel diatas, perkembangan hutang lancar dapat diketahui, walaupun mengalami penurunan tapi dalam periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 cenderung mengalami kenaikan. Melihat kecenderungan jumlah komponen hutang lancar dapat disimpulkan bahwa penginvestasian hutang usaha menjadi faktor utama dalam kenaikan dan atau penurunan hutang lancar. PT Pos Indonesia (Persero) karena memiliki tingkat proporsi investasi yang paling besar dari seluruh jumlah komponen hutang lancar.

Dari hasil perhitungan kedua komponen diatas yakni komponen aktiva lancar dengan hutang lancar maka, dapat diketahui besar modal kerja bersih PT Pos Indonesia (Persero), yang ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel 4.4

Tabel Perkembangan Modal Kerja PT Pos Indonesia (Persero)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	modal kerja
1997	913,635.70	710,581.86	203,053.85
1998	1,410,772.15	1,252,177.32	158,594.83
1999	1,567,811.98	1,405,419.04	162,392.94
2000	1,433,860.56	1,312,834.63	121,025.93
2001	1,525,273.99	1,368,721.15	156,552.84
2002	1,517,296.87	1,429,630.99	87,665.88
2003	1,847,677.59	1,798,572.30	49,105.28
2004	1,708,454.40	1,628,146.27	80,308.13
2005	1,870,918.38	1,854,392.27	16,526.10
2006	2,576,527.45	2,566,680.76	9,846.69

Dari penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan modal kerja PT Pos Indonesia (Persero) terlihat jelas dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Berdasarkan perhitungan dan analisis terhadap modal kerja, dimana modal kerja adalah sebagai variabel X, akan dapat diketahui presentase perubahan modal kerjanya.

4.1.2.2. Likuiditas

Tingkat likuiditas pada PT Pos Indonesia (Persero) dapat diketahui dengan cara membandingkan data yang tercantum dalam neraca, tepatnya dengan membandingkan elemen-elemen yang tergolong dalam aktiva lancar dengan hutang lancar. Sehingga diperoleh data sebagai berikut ini:

Tabel 4.6

Perkembangan Likuiditas PT Pos Indonesia (Persero)

(Dalam %)

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Likuiditas
1997	913,635.70	710,581.86	128.58
1998	1,410,772.15	1,252,177.32	112.67
1999	1,567,811.98	1,405,419.04	111.55
2000	1,433,860.56	1,312,834.63	109.22
2001	1,525,273.99	1,368,721.15	111.44
2002	1,517,296.87	1,429,630.99	106.13
2003	1,847,677.59	1,798,572.30	102.73
2004	1,708,454.40	1,628,146.27	104.93
2005	1,870,918.38	1,854,392.27	100.89
2006	2,576,527.45	2,566,680.76	100.38

4.1.2.3 Modal Kerja dan Likuiditas

Dari data-data diatas dapat diperoleh data penelitian pada PT Pos Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut ini

Tabel 4.8

Data modal kerja dengan Likuiditas

Tahun	Modal Kerja	Likuiditas
1997	203,053.85	128.58
1998	158,594.83	112.67
1999	162,392.94	111.55
2000	121,025.93	109.22
2001	156,552.84	111.44
2002	87,665.88	106.13
2003	49,105.28	102.73
2004	80,308.13	104.93
2005	16,526.10	100.89
2006	9,846.69	100.38

Data pada penelitian PT Pos Indonesia (Persero) terdiri dari 10 sampel, modal kerja sebagai variabel dependen (X) dan likuiditas dengan variabel independen (Y)

4.1.3

Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah dikemukakan tadi merupakan variabel-variabel yang sedang diteliti. Adanya data dari variabel yang diteliti tersebut memungkinkan untuk dihitung bagaimana variabel-variabel itu berhubungan dan berapa besar pengaruh dari variabel yang satu terhadap variabel yang lainnya. Untuk mengetahui hubungan ini dapat dihitung dengan menggunakan analisis statistik.

Tabel 4.9

Perhitungan Statistik Modal Kerja (X) dan Likuiditas (Y)

Untuk lebih mudah penghitungannya maka dibuat tabel sebagai berikut ini”

Tahun	Modal Kerja (X)	Likuiditas (Y)	X^2	XY	Y^2
1997	203,053.85	128.58	41,230,864,553.67	26,107,793.49	16,531.71
1998	158,594.83	112.67	25,152,320,281.62	17,868,169.84	12,693.52
1999	162,392.94	111.55	26,371,468,416.23	18,115,707.65	12,444.47
2000	121,025.93	109.22	14,647,275,066.00	13,218,291.13	11,928.72
2001	156,552.84	111.44	24,508,791,479.43	17,445,918.30	12,418.40

2002	87,665.88	106.13	7,685,306,095.38	9,304,160.47	11,264.01
2003	49,105.28	102.73	2,411,328,871.84	5,044,597.41	10,553.50
2004	80,308.13	104.93	6,449,395,763.53	8,426,931.95	11,010.83
2005	16,526.10	100.89	273,112,141.18	1,667,338.34	10,179.03
2006	9,846.69	100.38	96,957,227.15	988,446.14	10,076.87
Jumlah	1,045,072.47	1,088.52	148,826,819,896.04	118,187,354.72	1,184,880.55

- **Analisis Koefisien Korelasi**

Untuk mengetahui derajat hubungan antara modal kerja dengan likuiditas, maka dilakukan perhitungan korelasi *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$= \frac{(10 \times 118,187,354.72) - (1,045,072.47)(1,088.52)}{\sqrt{\{(10 \times 148,826,819,896.04) - (1,045,072.47)^2\} \{(10 \times 1,184,880.55) - (1,088.52)^2\}}}$$

$$= 0,898$$

Nilai korelasi pada perhitungan secara manual diatas adalah sebesar 0,898. Begitu pula berdasarkan pengolahan SPSS versi 12 seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Correlations

		likuiditas	modal
Pearson Correlation	likuiditas	1.000	.899
	modal	.899	1.000
Sig. (1-tailed)	likuiditas	.	.000
	modal	.000	.

N	likuiditas	10	10
	modal	10	10

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh koefisien korelasi antara modal kerja terhadap likuiditas pada PT Pos Indonesia (Persero) 0,898. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan modal kerja mempunyai hubungan positif terhadap perubahan likuiditas dan termasuk kategori yang kuat atau tinggi.

- **Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi dihitung untuk mencari berapa besar pengaruh pengembalian kredit terhadap tingkat profitabilitas. Perhitungan koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= r^2 \times 100\% \\
 &= (0,899)^2 \times 100\% \\
 &= 0,790321 \times 100\% \\
 &= 78,4\%
 \end{aligned}$$

Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 78,4%. Hal ini berarti bahwa modal kerja berpengaruh terhadap likuiditas 78,4% sedangkan sisanya 21,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal ini didukung oleh hasil pengolahan SPSS berikut:

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	.899(a)	.808	.784	3.83836	1.258
---	---------	------	------	---------	-------

a Predictors: (Constant), modal

b Dependent Variable: likuiditas

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R Square yakni 0,784

Pengujian hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu

H_0 : Modal kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap likuiditas.

H_1 : Modal kerja mempunyai pengaruh terhadap likuiditas.

Berdasarkan nilai Koefisien Determinasi, maka dapat diketahui bahwa:

H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh modal kerja terhadap likuiditas dapat diterima.

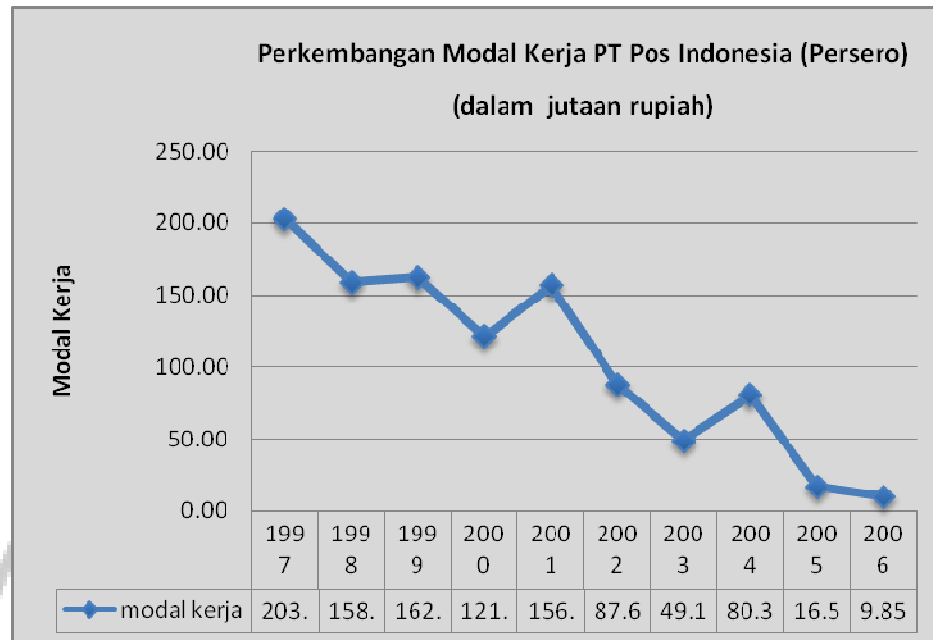
4.2 Pembahasan

Indikator utama modal kerja adalah elemen-elemen lancar dalam neraca, yaitu aktiva lancar dan hutang lancar. Manajemen dan kreditor jangka pendek terutama akan tertarik kepada posisi modal kerja suatu perusahaan, termasuk didalamnya

adalah perubahan-perubahan yang terjadi selama periode itu. Kenaikan dalam modal kerja mungkin ditunjukkan dalam kas, piutang, maupun dalam persediaan atau adanya penurunan atau berkurangnya hutang lancar dan adanya kenaikan dalam modal kerja ini akan ditafsirkan atau diinterpretasikan tergantung kepada sumber-sumber yang menyebabkan kenaikan tersebut. Apabila seluruh perubahan tersebut, semuanya berasal dari hasil operasi perusahaan maka hal ini akan dinilai sebagai hal yang baik, atau menguntungkan dibandingkan dengan kenaikan modal kerja yang berasal dari pengeluaran hutang jangka panjang. Laporan tentang perubahan modal kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya

Berikut ini adalah perkembangan modal kerja PT. Pos Indonesia (Persero) mulai dari tahun 1996 sampai dengan 2005 yang ditampilkan secara grafik

Grafik 4.1



Dari grafik diatas diperoleh bahwa peningkatan terjadi pada tahun 1997 sebesar Rp. 20.103.593.770,00 dari tahun 1996. Peningkatan kedua terjadi pada tahun 1998 sebesar Rp. 40.709.093.406,00 dari tahun 1997. Peningkatan ketiga terjadi pada Tahun 1999 sebesar Rp. 3.798.113.914,00 dari tahun 1998. Peningkatan selanjutnya terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp. 35.526.912.010,00 dari tahun 2000 dan yang terakhir peningkatannya terjadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 31.202.846.578,00. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 1996, tahun 2000, tahun 2002, tahun 2003, dan tahun 2005 masing masing adalah sebesar Rp. 16,215,586,436.00, Rp.41,367,017,231.00, Rp. 68,886,961,657.00, Rp. 38,560,594,057.00, dan Rp. 63,782,025,281.00.

Dari Data diatas juga dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang terbesar terjadi pada tahun 1998 sebesar Rp. 40.709.093.406,00 dari tahun sebelumnya, dan

penurunan yang terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp. 63,782,025,281.00 dari tahun sebelumnya.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa modal kerja cenderung mengalami perubahan. Dibawah ini disajikan data persentase perubahan modal kerja PT Pos Indonesia (Persero) yaitu sebagai berikut ini :

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus segera dibayar, dimana rasio pengukurannya dikenal dengan rasio likuiditas. Sehubungan dengan fungsinya sebagai alat ukur kemampuan perusahaan untuk membiayai hutang-hutangnya yang segera dipenuhi dengan aktiva lancarnya, maka pengukuran dilaksanakan dengan membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan mulai dari periode tahun penelitian 1996-2005.

Hasil perhitungan dianalisis untuk kemudian dipelajari guna memberikan gambaran apakah ada kemajuan atau kemunduran kondisi keuangan perusahaan, khususnya pada penelitian ini adalah PT. Pos Indonesia (Persero) selama periode penelitian yang ditentukan sebelumnya dan dilanjutkan dengan membandingkan sesuai dengan standar likuiditas yang telah ditetapkan, dimana:

1. over likuid (diatas tingkat likuiditas standar)
2. likuid (sesuai dengan standar likuiditas atau mendekati)
3. ilikuid (dibawah tingkat likuiditas standar)

“*current ratio*” yang kurang dari 200% dianggap kurang baik “ Bambang Riyanto(2001: 26). Telah dijelaskan di Baab II, bahwa pada penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah “*current ratio*” . Penelitian ini menggunakan

"current ratio" sebagai pengukur tingkat likuiditas secara menyeluruh dimulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Sehingga diperoleh hasil perhitungan tingkat likuiditasnya Di bawah ini adalah perkembangan likuiditas PT. Pos Indonesia (Persero) pada tahun 1996 sampai dengan 2005.

Grafik 4.3



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa tingkat likuiditas pada PT Pos Indonesia (Persero) berada dalam kondisi "ilikuid" karena walaupun memungkinkan terjadinya peningkatan pada tahun tertentu yakni pada tahun 1998, tahun 2001, dan tahun 2004, sebesar 113%, 111%, 105%, tetapi hal itu juga belum menunjukkan posisi yang baik bagi tingkat likuiditas pada PT Pos Indonesia

(Persero). PT Pos Indonesia (Persero) tingkat likuiditasnya berada pada posisi “ilkuid” , karena presentase *current rasionya* kurang dari 200%. Hal ini diakibatkan karena hutang lancar yang cenderung meningkat di tiap-tiap tahunnya tanpa didukung oleh fluktuasi aktiva lancar yang mungkin menguntungkan.

Terdapat pengaruh antara modal kerja dengan tingkat likuiditas, dimana besar pengaruh modal kerja terhadap tingkat likuiditas adalah sebesar 78,4% dengan sisa 21,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti misalnya aktiva tetap.

